Peran kepercayaan politik, efikasi politik, dan orientasi kandidat terhadap partisipasi politik

Randy Pranata Putra⁽¹⁾, Tengku Rika Valentina⁽²⁾, Indah Adi Putri⁽³⁾

(1), (2), (3) Program Studi Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

In Indonesia, we currently see the increasing participation of citizens in several legislative elections. In 2009, the political participation rate in the legislative elections was 79%, 75.11% in 2014, which then increased to 81.69% in 2019. This phenomenon raises the question of what factors influence the trend of increasing public political participation. This study aimed to determine the role of political trust, political efficacy, and candidate orientation in explaining public political participation in the 2019 legislative elections. Of the 400 participants, 50% are male and 50% are female, who were selected based on cluster sampling. Designed as correlational research, the results showed that either simultaneously or partially, political trust, political efficacy, and candidate orientation played a significant role in explaining political participation. These findings practically imply that in elections, people's political participation is the key to democracy. To actualise democratic political participation, thus, both the government, legislative candidates, and political parties must pay attention to the importance of the role of political trust, political efficacy, and candidate orientation.

Keywords: candidate orientation, political efficacy, political participation, political trust

Fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia adalah meningkatnya keikutsertaan warga dalam beberapa pemilihan legislatif. Pada tahun 2009, tingkat partisipasi politik pada Pemilu legislatif 79%, tahun 2014 75.11%, dan tahun 2019 meningkat menjadi 81.69%. Hal ini memunculkan pertanyaan faktor apa yang memengaruhi trend peningkatan partisipasi politik masyarakat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepercayaan politik, efikasi politik, dan orientasi kandidat dalam menjelaskan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu legislatif tahun 2019. Partisipan berjumlah 400 (50% laki-laki, 50% perempuan), yang diseleksi atas dasar cluster sampling. Desain penelitian adalah kuantitatif korelasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun secara parsial, kepercayaan politik, efikasi politik, dan orientasi kandidat berperan signifikan dalam menjelaskan partisipasi politik. Hasil penelitian memberikan implikasi praktis bahwa dalam Pemilu, partisipasi politik masyarakat menjadi kunci dalam demokrasi. Agar partisipasi politik yang demokratis bisa tercapai, dengan demikian, baik pemerintah, calon legislatif, maupun partai politik harus memperhatikan pentingnya peran kepercayaan politik, efikasi politik, serta orientasi kandidat.

Kata kunci: efikasi politik, kepercayaan politik, orientasi kandidat, partisipasi politik

MEDIAPSI, 2021, Vol. 7(2), 166–178, DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2021.007.02.8>

Received: 20-07-2021. Revised: 19-11-2021. Accepted: 27-11-2021. Published online: 25-12-2021

Handling Editor: Esti Zaduqisti, IAIN Pekalongan, Indonesia.

*Corresponding author: Randy Pranata Putra, Program Studi Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia. E-mail: Randypranataputra@gmail.com

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

How to cite this article in accordance with the American Psychological Association (APA) 7th guidelines:
Putra, R. P., Valentina, T. R., & Putri, I. A. (2021). Peran kepercayaan politik, efikasi politik, dan orientasi kandidat terhadap partisipasi politik. *MEDIAPSI*, 7(2), 166–178. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2021.007.02.8>

Pendahuluan

Pemilihan umum atau Pemilu adalah bagian penting dalam suatu proses demokrasi di Indonesia (Aulia, 2016; Zuhro, 2019). Pemilu secara sederhana diartikan sebagai kontrak politik antara warga, orang atau partai politik dalam melakukan aktivitas politik (Sanit, 2016). Partisipasi politik pada Pemilu memengaruhi posisi legitimasi yang diberikan masyarakat terhadap calon terpilih, di mana setiap individu memiliki keinginan dan kepentingannya sendiri dalam menentukan pilihan politiknya (Pardede, 2014). Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan individu dan sekelompok individu dalam berpartisipasi secara aktif pada setiap proses politik, misalnya dengan cara memilih pemimpin dalam Pemilu (Budiarto, 2010).

Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini pada Pemilu legislatif adalah meningkatnya keikutsertaan masyarakat, dengan partisipasi pada Pemilu legislatif sebesar 79% pada tahun 2009, 75.11% pada tahun 2014, dan 81.69% pada tahun 2019 (Rahadian, 2019). Hal ini menimbulkan pertanyaan apa yang akan memengaruhi partisipasi politik masyarakat.

Menurut Paige (dalam Hetherington, 1998), kesadaran dan kepercayaan politik terhadap pemerintah atau sistem politik menentukan tingkat partisipasi politik seseorang. Kepercayaan politik adalah arah evaluasi dari bagian-bagian sistem politik yang dilandasi pada harapan yang normatif. Sejalan dengan argumentasi ini, riset Wahyudi (2013) menyimpulkan bahwa dengan meningkatkan kepercayaan politik, individu dengan keyakinan politik

cenderung untuk berpartisipasi dalam setiap kebijakan atau keputusan politik.

Selain kepercayaan politik, efikasi politik juga berpengaruh terhadap partisipasi politik (McDonnell, 2020). Menurut Craig (1990), efikasi internal merupakan keyakinan pada kemampuan individu dalam memahami keikutsertaannya secara positif dalam proses politik. Efikasi internal ini meliputi persepsi diri, pengetahuan individu terhadap politik, pemahaman terhadap politik, kepercayaan diri terhadap politik untuk berpartisipasi dalam proses politik, dan kapasitas individu dalam politik (Craig, 1990). Penelitian Fitriah (2014) tentang peran nilai pribadi dan efikasi internal terhadap keikutsertaan atau partisipasi politik pada mahasiswa pemilih pemula menemukan bahwa secara parsial efikasi internal berkorelasi positif secara signifikan dengan partisipasi politik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi efikasi internal mahasiswa maka semakin meningkat partisipasi politik mahasiswa.

Selain kepercayaan politik dan efikasi politik, menurut Hendarmin (2007), aktor politik juga menjadi penentu partisipasi politik. Aktor politik membuat kontrak sosial bersama rakyat pada saat Pemilu. Sementara itu, masyarakat dengan bebas memilih kandidat yang mereka anggap bisa dipercaya untuk menduduki jabatan eksekutif dan legislatif sehingga rakyat yang sudah memiliki hak pilih dengan bebas akan menentukan kandidat yang sesuai dengan pikirannya.

Dari uraian di atas, penelitian ini akan membahas mengenai peran *political trust* atau kepercayaan politik, efikasi politik, dan orientasi kandidat dalam

menjelaskan partisipasi politik pada politik lokal secara komprehensif. Mengembangkan riset-riset sebelumnya, penelitian ini mengintegrasikan peran tiga faktor tersebut (kepercayaan politik, efikasi politik, dan orientasi kandidat) dalam menjelaskan partisipasi politik. Ada beberapa gejala menarik pada pelaksanaan Pemilu legislatif di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2019, khususnya ketika membahas tentang partisipasi politik.

Pertama, adanya kecenderungan meningkatnya partisipasi masyarakat yang dipengaruhi oleh kesadaran serta kepercayaan politik yang tinggi terhadap terhadap sistem politik. Secara lebih spesifik, tingkat partisipasi politik pada Pemilu legislatif di Kabupaten Pasaman Barat mengalami peningkatan di tahun 2019 dibandingkan dengan partisipasi politik di tahun 2014 (Maulana, 2018; Nurhasim, 2014). Keikutsertaan masyarakat Pasaman Barat dalam Pemilu tidak hanya pada tahap pemberian suara saja tetapi masyarakat Pasaman Barat juga ikut mengawal jalannya Pemilu seperti ikut menjadi relawan demokrasi (Agung, 2019). Kenaikan tingkat partisipasi ini melebihi target nasional dengan persentase 77.5%.

Kedua adalah adanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan masyarakat untuk melaksanakan hak serta kewajiban sebagai warga dalam suatu negara. Ada keyakinan bahwa mereka bisa memengaruhi proses politik. Salah satu bentuk kesadaran politik yang timbul adalah ketika ada salah satu calon legislatif yang diduga kuat melakukan *money politics*, masyarakat segera melaporkan kejadian tersebut kepada badan pengawas Pemilu (Bawaslu) (Riyanda dkk., 2021). Hal ini

mengandung arti bahwa masyarakat sadar dan berperan aktif dalam pengawal jalannya Pemilu.

Ketiga adalah adanya pergeseran karakteristik orientasi masyarakat dalam menilai calon pemimpin legislatif di Indonesia tahun 2019 (Wahidin dkk., 2020). Terkait dengan pergeseran orientasi ini, para ilmuwan memberikan bukti kuat bahwa faktor-faktor penentu utama perilaku memilih di Indonesia bergeser ke arah faktor psikologis dan ekonomi-politik. Faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh untuk menentukan perilaku memilih masyarakat. Sampai saat ini, para akademisi politik telah berusaha memberi penjelasan karakteristik dari Pemilu, namun sebagian besar kajian yang ada masih berdasarkan pendekatan sosiologis, atau hanya mempertimbangkan variabel sosial ekonomi (Haryanto, 2014).

Pada kontestasi pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019, ada 40 jumlah kursi yang menjadi perebutan yang terdiri dari empat daerah pemilihan (Dapil). Dari 40 anggota DPRD terpilih, 25 kursi anggota DPRD adalah wajah baru yang terpilih dan hanya 15 kursi wajah lama yang terpilih kembali sebagai anggota DPRD (“KPU Pasaman Umumkan Nama-nama Anggota DPRD Pasaman Periode 2019-2024”). Kekalahan 25 petahana anggota DPRD menjadi hal menarik untuk diteliti lebih lanjut. Peneliti berasumsi kekalahan ini dipengaruhi oleh faktor orientasi kandidat pemilih di mana pemilih telah mengenal calon kandidat petahana, baik dari latar belakang kandidat, rekam jejak kandidat, visi misi, program kerja kandidat yang selama menjabat yang tidak maksimal.

Mengacu pada landasan teori dan temuan-temuan riset sebagaimana

dijabarkan di atas, penelitian ini mengajukan tiga hipotesis. Pertama, political trust atau kepercayaan politik berperan signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik, dimana semakin tinggi kepercayaan politik maka semakin tinggi partisipasi politik (H_1). Kedua, efikasi politik berperan signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik, dimana semakin tinggi efikasi politik maka semakin tinggi partisipasi politik (H_2). Ketiga, orientasi kandidat berperan signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik, dimana semakin positif persepsi terhadap orientasi kandidat maka semakin tinggi partisipasi politik (H_3).

Metode

Partisipan dan desain penelitian

Sampel penelitian diseleksi atas dasar *cluster sampling* dan sampling acak sederhana. Dengan metode *sampling* ini, *cluster* yang dijadikan sebagai patokan penentuan sampel adalah kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Cara sampling *cluster* seperti ini digunakan melalui dua tahapan, yaitu tahapan awal dengan menentukan jumlah dari sampel daerah, dan tahapan selanjutnya dengan menentukan orang yang berada pada daerah itu secara sampling (Sarwono, 2006). Peneliti menggunakan metode *cluster sampling* dikarenakan populasi Kabupaten Pasaman Barat Terbagi atas 4 Daerah Pemilihan dengan karakteristik masyarakat yang heterogen dengan total sampel sebanyak 400 responden.

Penelitian ini melibatkan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang sudah memiliki hak pilih atau sudah berumur 17 tahun dalam pemilihan legislatif pada tahun 2019. Hal itu dilakukan karena dengan kriteria tersebut masyarakat

dianggap sudah memiliki nalar dan cara bertutur kata yang baik, sesuai dengan sikap kedewasaan dan tingkat pengetahuan yang dinilai sudah berkembang ke arah penalaran yang baik. Komposisi jenis kelamin partisipan adalah 50% laki-laki dan 50% perempuan. Peneliti menggunakan sampling acak sederhana untuk menentukan responden yang akan diberikan kuesioner.

Penelitian ini menggunakan metode survei korelasional. Desain survei digunakan untuk memperoleh data empirik dalam menganalisis hubungan *political trust*, efikasi politik dan orientasi kandidat terhadap partisipasi pada Pemilu legislatif tahun 2019 (Singarimbun, 1995). Sumber data utama yang peneliti gunakan adalah kuesioner sebagai analisis kepercayaan politik, efikasi politik, orientasi kandidat, dan partisipasi masyarakat.

Prosedur dan pengukuran

Dengan menggunakan fasilitas angka acak yang tersedia pada komputer, peneliti mengurutkan DPT pemilih dan masukan ke dalam rumus komputer. Penarikan sampel dilakukan dari Nagari Lingkung Aua dengan tempat pemungutan suara (TPS) yang pertama terpilih sebanyak 5 dengan jumlah populasi (DPT) 150. Selanjutnya, dari 150 pemilih, diperlukan 6 sampel yang dijadikan responden. Setelah diacak menggunakan komputer, yang terpilih adalah 6 responden pertama yaitu responden nomor 23, 38, 57, 3, 1, dan 3. Peneliti mendatangi responden yang terpilih dan yang bersedia berpartisipasi secara suka rela.

Penelitian ini memakai empat variabel. Pertama adalah kepercayaan politik atau *political trust* sebagai variabel

independent pertama (X_1). Kedua adalah efikasi politik sebagai variabel independent kedua (X_2). Ketiga adalah orientasi kandidat sebagai variabel independent ketiga (X_3), dan keempat adalah partisipasi politik sebagai variabel dependen (Y). Kualitas psikometris masing-masing variabel diukur atas dasar internal consistency *Cronbach Alpha*. Suatu variabel atau skala dinyatakan reliabel atau memiliki konsistensi internal yang memadai jika nilai *Cronbach Alpha* lebih besar .60 (Ponterotto & Ruckdeschel, 2007).

Peneliti mengadaptasi alat ukur kepercayaan politik yang disusun oleh Loeber (2011). Alat ukur kepercayaan politik ini terdiri dari 12 butir pertanyaan dan tiga dimensi: kepercayaan pada politisi (*trust* pada politisi, termasuk pejabat pemerintah), kepercayaan pada organisasi atau institusi (kepercayaan pada lembaga politik, termasuk DPR, DPRD), dan kepercayaan pada demokrasi (kepercayaan pada sistem demokrasi). Dalam penelitian ini, reliabilitas alat ukur kepercayaan politik memadai karena nilai *Cronbach Alpha* (α) = .97 (Ponterotto & Ruckdeschel, 2007).

Selanjutnya, variabel efikasi politik mengadaptasi dari teori Craig (1990), yang mengatakan bahwa *internal political efficacy* merupakan keyakinan tentang kompetensi seseorang untuk memahami dan berpartisipasi secara efektif dalam politik. *Internal efficacy* terdiri dari *self-perception* yang meliputi pengetahuan politik, pemahaman politik, kepercayaan diri untuk terlibat dalam urusan politik, dan kemampuan dalam urusan politik. Sementara itu, Beaumont (2011) menjelaskan bahwa efikasi politik internal berkembang melalui pengaturan dan

interaksi sosial dengan penekanan pada pengalaman politik. Pada literatur psikologi sosial, dimensi ini disebut *political self-efficacy*, dan dipahami sebagai aspek domain spesifik dari pengertian umum *self-efficacy*. Efikasi politik dalam penelitian ini diukur dengan 5 butir pertanyaan dan memiliki nilai *Cronbach Alpha* yang memadai (α = .85).

Untuk variabel orientasi kandidat, peneliti menggunakan mazhab Michigan (Cambell, 1966). Secara lebih spesifik, orientasi kandidat diukur atas dasar pengetahuan tentang calon kandidat, nilai serta sikap dari pemilih dalam mengamati calon pada proses pemilihan umum, pengetahuan mengenai integritas calon kandidat, kepedulian calon pada masyarakat, keteladanan calon kandidat, serta reputasi dari calon kandidat serta cara bicara dari kandidat. Dalam penelitian ini, orientasi kandidat diukur dengan 20 butir pertanyaan. Hasil menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* variabel orientasi kandidat dalam penelitian ini adalah sangat memadai (α = .97).

Sedangkan untuk partisipasi politik, peneliti mengukur variabel dependen tersebut atas dasar teori Gabriel A. Almond (dalam MacAndrews, 1991). Konstruk ini mencerminkan bentuk partisipasi konvensional dengan beberapa indikator. Indikator-indikator tersebut mencakup pemungutan suara dalam Pemilu, diskusi mengenai politik, aktifitas atau kampanye yang dilakukan kandidat, afiliasi dengan partai politik, dan komunikasi secara pribadi dengan kandidat dan pejabat. Partisipasi politik diukur dengan 7 butir pertanyaan, yang memiliki reliabilitas sangat memadai (*Cronbach alpha* [α] = .90).

Hasil

Pengujian hipotesis untuk penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda melalui perantara perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 21. Sebelum uji hipotesis, peneliti terlebih dahulu melakukan pengujian asumsi klasik, yang meliputi uji multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan pengujian normalitas.

Untuk uji multikolinieritas, didapatkan nilai *variance inflation factor* (VIF) untuk variabel *political trust* sebesar 3.529, efikasi politik sebesar

3.233, dan orientasi kandidat sebesar 4.709. Sementara itu, nilai *Tolerance* variabel *political trust* sebesar .283, efikasi politik sebesar .309, dan orientasi kandidat sebesar .212. Nilai VIF ketiga variabel tersebut lebih kecil dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0.1. Dengan hasil ini, bisa disimpulkan tidak adanya multikolinieritas pada ketiga variabel bebas dalam penelitian ini (Senaviratnadkk., 2019; Thompson dkk., 2017).

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas Hubungan antar Variabel Penelitian.

Uji autokorelasi dilakukan dengan membandingkan nilai *Durbin Watson* hitung (DW) dan *Durbin Watson Upper* (DU). Autokorelasi tidak terjadi jika nilai DW lebih besar dari nilai DU (Chen, 2016). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya autokorelasi

karena nilai DW hitung (1.822) lebih besar dibandingkan dengan nilai DU (1.284).

Hasil pengujian *heteroskedastisitas* dilakukan dengan cara membuat *Scatterplot* hubungan antara nilai residual dan nilai prediksi yang telah distandarisasi (Fox, 2019). Sebagaimana bisa dilihat

pada Gambar 1, hasil menunjukkan bahwa sebaran titik atau Scatterplot yang tidak membentuk pola tertentu. Bukti visual ini membuktikan bahwa hubungan antar variabel dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Terakhir, uji normalitas dilakukan atas dasar sebaran titik *Probability Plot* (*P*

Plot). Sebagaimana bisa dicermati pada Gambar 2, hasil menunjukkan bahwa *P Plot* mendekati garis lurus sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Hasil ini sejalan dengan asumsi klasik dari regresi linier dengan pendekatan *ordinary least square* (OLS; Das dkk., 2016).

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Variabel Penelitian.

Hasil pengujian hipotesis-hipotesis penelitian ditampilkan dalam Tabel 1 di bawah ini. Sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 1, secara keseluruhan atau simultan, ketiga variabel independen dalam penelitian ini

(kepercayaan politik, efikasi politik, dan orientasi kandidat) mampu menjelaskan secara signifikan variabel dependen partisipasi politik, $R = .81$, $F = 257.47$, $p < .001$, dengan persentase sebanyak 66%, $R^2 = .661$.

Tabel 1. Regresi Linier Berganda Untuk Menjelaskan Partisipasi Politik.

Efek	<i>B</i>	<i>SE</i>	β	<i>t</i>	<i>p</i>
Konstanta	-2.13	.81	—	-2.64	.009
Kepercayaan politik	.09	.02	.22	3.95	< .000
Efikasi politik	.20	.07	.14	2.67	.008
Orientasi kandidat	.21	.03	.50	7.88	< .000

Keterangan. *B* = koefisien regresi parsial tidak terstandarisasi. *SE* = eror terstandarisasi. *B* = koefisien regresi parsial terstandarisasi. *t* = nilai *independent t-test* untuk masing-masing variabel independen. *p* = nilai signifikansi.

$$Y = -2.13 + 0.09X_1 + 0.20X_2 + 0.21X_3 + e \quad (1)$$

Mengacu pada persamaan (1) di atas, koefisien regresi kepercayaan politik (X_1) bernilai positif. Artinya, semakin bertambah kepercayaan politik maka makin memengaruhi partisipasi politik masyarakat multi etnis pada Pemilu legislatif Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019. Begitu pula sebaliknya, semakin berkurangnya kepercayaan politik maka semakin berkurang partisipasi politik masyarakat multi etnis pada Pemilu legislatif Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019.

Koefisien regresi efikasi politik (X_2) juga bernilai positif. Artinya, semakin bertambahnya efikasi politik maka makin memengaruhi partisipasi politik masyarakat multi etnis pada Pemilu legislatif Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019. Begitu pula sebaliknya, semakin berkurangnya efikasi politik maka semakin berkurang partisipasi politik masyarakat multi etnis pada Pemilu legislatif Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019.

Terakhir, koefisien regresi orientasi kandidat (X_3) bernilai positif. Artinya,

semakin positif orientasi kandidat maka semakin besar partisipasi politik masyarakat multi etnis pada Pemilu legislatif Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019. Begitu pula sebaliknya, semakin negatif orientasi kandidat maka semakin menurun partisipasi politik masyarakat multi etnis pada Pemilu legislatif Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019.

Diskusi

Fenomena pada penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Pertama, penelitian sebelumnya tentang hubungan kepercayaan politik, efikasi politik, dan orientasi kandidat terhadap partisipasi politik tidak komprehensif dalam menjelaskan partisipasi politik, khususnya pada ranah politik lokal. Kedua, penelitian ini bertujuan membuktikan adanya kecenderungan pergeseran perilaku pemilih dalam politik lokal atas dasar faktor-faktor psikologis, yang cenderung jarang diteliti. Kebanyakan studi sebelumnya menekankan pada kajian atau pendekatan sosiologis. Ketiga, ada trend peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu legislatif.

Peran kepercayaan politik terhadap partisipasi politik

Hasil penelitian ini menemukan bahwa, sesuai hipotesis pertama (H_1), kepercayaan politik berperan signifikan dalam menjelaskan partisipasi politik masyarakat multi etnis pada Pemilu legislatif Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2019. Kepercayaan politik telah tercermin dalam kehidupan sehari-hari di Kabupaten Pasaman Barat dan dijadikan sebagai dasar berperilaku di Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilu legislatif tahun 2019. Kepercayaan politik masyarakat menggambarkan bahwa setiap individu masyarakat Pasaman Barat memiliki kepercayaan politik terhadap politisi, institusi, dan sistem demokrasi. Hal ini memberikan pengaruh signifikan pada partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum. Tingginya kepercayaan politik masyarakat berdampak pada makin tingginya partisipasi politik masyarakat. Kepercayaan politik masyarakat Pasaman Barat pada saat Pemilu merefleksikan adanya kepercayaan terhadap calon legislatif yang maju pada Pemilu dan kepercayaan terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh calon legislatif. Selanjutnya, masyarakat percaya bahwa calon anggota DPRD lebih mementingkan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi. Masyarakat percaya bahwa calon anggota DPRD tidak akan ingkar janji. Masyarakat percaya calon anggota DPRD memberikan informasi, isu-isu politik, berita politik dengan benar, dan percaya terhadap partai yang diusung oleh calon anggota DPRD pada saat Pemilu legislatif tahun 2019.

Latar-belakang masyarakat yang multi etnis ternyata tidak memengaruhi kepercayaan politik. Hal ini terlihat dari

temuan bahwa responden dengan ragam etnis, mulai dari etnis Jawa, Minang, atau Mandailing memiliki kepercayaan politik yang tinggi. Dengan demikian, tidak ada perbedaan kepercayaan politik masyarakat multi etnis Kabupaten Pasaman Barat. Kepercayaan politik masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang cukup tinggi juga di pengaruhi oleh tingkat pendidikan dari masyarakat; semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin berdampak terhadap kepercayaan politik seseorang.

Peran efikasi politik terhadap partisipasi politik

Dalam penelitian ini, mendukung hipotesis kedua (H_2), efikasi politik masyarakat terbukti berperan signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Efikasi politik masyarakat pada penelitian ini tumbuh karena alasan-alasan tertentu. Pertama, warga memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai isu politik yang terjadi pada Pemilu tahun 2019. Kedua, masyarakat telah memiliki pengetahuan mengenai politik yang tidak kalah dengan orang lain pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pasaman Barat. Ketiga, masyarakat Pasaman Barat juga berpartisipasi secara aktif dalam proses politik Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pasaman Barat. Keempat, tingkat pendidikan masyarakat yang cukup tinggi yang berdampak terhadap kesadaran politik masyarakat.

Peran orientasi kandidat terhadap partisipasi politik

Orientasi kandidat masyarakat dalam penelitian ini terbukti secara empiris menjadi prediktor positif partisipasi politik masyarakat, mendukung Hipotesis ketiga (H_3). Beberapa penelitian terdahulu juga mendukung temuan ini.

Sebagai contoh, penelitian [Sari \(2020\)](#) yang membahas mengenai pengaruh perilaku pemilih terhadap partisipasi politik di Sumatera Utara dalam pemilihan Gubernur tahun 2018, khususnya di Kecamatan Stabat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional secara simultan berpengaruh terhadap partisipasi politik di Sumatera Utara dalam pemilihan gubernur tahun 2018 khususnya di Kecamatan Stabat. Selain itu, penelitian [Rahmawati \(2016\)](#) di Kelurahan Sunter Agung dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 menyimpulkan bahwa *figure* calon yang memiliki kemampuan dan kredibilitas berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat ([Rahmawati, 2016](#)).

Hasil kajian ini mengenai pengaruh orientasi kandidat masyarakat terhadap partisipasi politik, memperkuat kajian-kajian teori tentang partisipasi politik sebelumnya. Disimpulkan bahwa orientasi kandidat yang tinggi dalam Pemilu sangat memengaruhi partisipasi politik. Partisipasi ini dapat berbentuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam Pemilu. Berpartisipasi aktif seperti ikut membantu partai politik atau calon kandidat untuk memperoleh suara, dan terlibat di setiap proses politik dalam Pemilu.

Hasil-hasil penelitian lain menunjukkan bahwa dalam ranah politik lokal, terjadi perubahan perilaku memilih masyarakat yang selama ini melihat dari faktor sosiologis beralih kepada faktor psikologis. Aliran politik yang dipandang sebagai pendekatan sosiologis hanya dapat dipelajari dalam bidang politik lokal. Menurut [Mujani dkk. \(2012\)](#), ras dan etnis juga dianggap sebagai faktor sosiologis yang memengaruhi cara seseorang

memilih partai politik atau kandidat untuk jabatan publik. Partai-partai yang secara tradisional memperjuangkan kesetaraan ras dan etnis cenderung didukung oleh kelompok ras dan etnis minoritas karena kelompok ini terkena dampak langsung dari isu tersebut. Secara khusus, kesamaan ras dan etnis antara pemilih dan calon pejabat publik cenderung memengaruhi perilaku memilih.

Tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini membuktikan bahwa dalam ranah politik lokal dengan karakter masyarakat yang heterogen, faktor psikologis lebih dominan dalam menentukan orientasi kandidat. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian ini bahwa masyarakat setuju ikut memilih calon legislatif (caleg) atas dasar hasil evaluasi terhadap caleg tersebut pada Pemilu Pasaman Barat tahun 2019 serta penilaian mengenai visi, misi, dan program unggulan caleg. Penilaian terhadap caleg ini sangat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu caleg baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.

Dinamika pergeseran perilaku memilih di atas selanjutnya memengaruhi penilaian pemilih terhadap caleg. Masyarakat juga mengetahui sosialisasi yang dilakukan oleh caleg pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pasaman Barat. Semakin selaras posisi atau pendapat pemilih dengan kandidat tertentu, maka semakin besar kemungkinan bahwa mereka akan memilih kandidat tersebut. Hal ini juga mendukung asumsi peneliti bahwa kekalahan 25 petahana dipengaruhi oleh orientasi kandidat di mana masyarakat Pasaman Barat mengevaluasi kandidat

dalam hal kemampuan mereka untuk bertindak dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi.

Kesimpulan

Kepercayaan politik, efikasi politik, dan orientasi kandidat dalam penelitian ini berperan signifikan dalam menjelaskan partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pemilu legislatif di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2019. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa penilaian masyarakat terhadap kapasitas politik diri mereka sendiri dan kapasitas politik lembaga serta kandidat politik berperan penting dalam menentukan tingkat partisipasi politik dalam Pemilu legislatif.

Salah satu klemahan dari penelitian ini terkait pada pembatasan konteks dalam Pemilu legislatif. Untuk menutupi kelemahan ini, studi lanjutan yang tertarik pada tema yang sama bisa berfokus pada konteks lain, misalnya Pemilu eksekutif (bupati/walikota, gubernur, predisen dan wakil presiden) untuk menguji sejauh mana kepercayaan politik, efikasi politik, dan orientasi kandidat berperan signifikan dalam menjelaskan partisipasi masyarakat dalam kontestasi politik selain Pemilu legislatif.

Daftar Pustaka

- Agung, T. (2019, April 04). Polsek Talamau amankan jalannya kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu 2019. *POLRI.GO.ID*. <https://pasamanbarat.sumbar.polri.go.id/2019/04/04/polsek-talamau-amankan-jalannya-kegiatan-sosialisasi-penyelenggaraan-Pemilu-2019/>
- Aulia, D. (2016). Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 115-126. <https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.362>
- Beaumont, E. (2011). Promoting political agency, addressing political inequality: A multilevel model of internal political efficacy. *The Journal of Politics*, 73(1), 216-231. <https://doi.org/10.1017/S0022381610000976>
- Budiarjo, M. (2010). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Cambell, A. (1966). *The American Voter*. John Wiley and Sons, Inc.
- Chen, Y. (2016). Spatial autocorrelation approaches to testing residuals from least squares regression. *PloS one*, 11(1), e0146865. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146865>
- Craig, S. C., Niemi, R. G., & Silver, G. E. (1990). Political efficacy and trust: A report on the NES pilot study items. *Political behavior*, 12(3), 289-314. <https://doi.org/10.1007/BF00992337>
- Das, K. R., & Imon, A. H. M. R. (2016). A brief review of tests for normality. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 5-12. <http://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.12>
- Fitriah, E. A. (2014). Personal Values Dan Internal Political Efficacy Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Pemilih Pemula (Studi Pada Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Fakultas Adab Dan Humaniora, Serta Fakultas Dakwah

- Dan Komunikasi Uin Sgd Bandung). *Psymphathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(2), 244-254. <https://doi.org/10.15575/psy.v1i2.480>
- Fox, J. (2019). *Regression diagnostics: An introduction*. Sage publications.
- Haryanto, H. (2014). Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(3), 291-308. <https://doi.org/10.22146/jsp.13082>
- Hendarmin. (2007). *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Fokusmedia.
- Hetherington, M. J. (1998). The Political Relevance of Political Trust. *American Political Science Review*, 92(4), 791-808. <https://doi.org/10.2307/2586304>
- KPU Pasaman Umumkan Nama-nama Anggota DPRD Pasaman Periode 2019-2024. (2019, Juli 20). *Pasamankab.go.id*. <https://www.pasamankab.go.id/berita/kpu-pasaman-umumkan-nama-nama-anggota-dprd-pasaman-periode-2019-2024>
- Loeber, L. (2011). *Political trust and trust in the election process*. Caltech/MIT: Voting.
- MacAndrews, M. M. (1991). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta.
- Maulana, A. (2019, Mei 04). Partisipasi memilih Pemilu di Pasaman Barat 88 persen. *ANTARANEWS*. <https://Pemilu.antaranews.com/berita/862691/partisipasi-pemilih-Pemilu-di-pasaman-barat-88-persen>
- McDonnell, J. (2020). Municipality size, political efficacy and political participation: a systematic review. *Local Government Studies*, 46(3), 331-350. <https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1600510>
- Mujani, S., Liddle, R.W., Ambaerdi, K. (2012). *Kuasa Rakyat*. Mizan.
- Nurhasim, M. (Ed.). (2014). *Partisipasi memilih pada Pemilu 2014: Studi penajakan*. https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Partisipasi_Pemilih_pada_Pemilu_2014_Studi_Penajakan.pdf
- Pardede, M. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1), 85-99. <http://doi.org/10.33331/rechtsvindin.g.v3i1.58>
- Ponterotto, J. G., & Ruckdeschel, D. E. (2007). An overview of coefficient alpha and a reliability matrix for estimating adequacy of internal consistency coefficients with psychological research measures. *Perceptual and Motor Skills*, 105(3), 997-1014. <https://doi.org/10.2466%2Fpms.105.3.997-1014>
- Rahardian, L. (2019, 14 Juni). Tingkat Partisipasi Pemilu 2019 Naik: Positif atau Negatif? *Kabar24*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20190614/15/933808/tingkat-partisipasi-Pemilu-2019-naik-positif-atau-negatif>
- Rahmawati, R. (2017). Pengaruh Figur Calon Pemimpin Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Sunter Agung, Pada Pemilukada DKI JAKARTA 2012. *Journal of Governance*, 1(1), 98-119.

- <http://doi.org/10.31506/jog.v1i1.1841>
- Riyanda, R., indah Yandri, L., Putri, T. D., Khairiyah, K., & Rahmadi, D. (2021). Sosialisasi dan pendidikan politik: Persiapan Pilkada 2020 di Kabupaten Pasaman Barat. *Menara Pengabdian*, 1(1), 32-40. <https://doi.org/10.31869/jmp.v1i1.2674>
- Sanit, A. (2016). Kontrak Sosial dan Pemilihan Umum. *Jurnal Penelitian Politik*, 1(1), 3-7. <https://doi.org/10.14203/jpp.v1i1.366>
- Sari, E., Amin, M., & Warjio, W. (2020). Influence of Voting Behavior on Political Participation in North Sumatera Governor Election Year 2018 Particularly in Stabat Sub-District. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(1), 671-678. <http://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i1.1436>
- Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Graha Ilmu.
- Senaviratna, N. A. M. R., & Cooray, T. M. J. A. (2019). Diagnosing multicollinearity of logistic regression model. *Asian Journal of Probability and Statistics*, 5(2), 1-9. <https://doi.org/10.9734/ajpas/2019/v5i230132>
- Singarimbun, M. (1995). *Metode Penelitian Survei*. LP3S.
- Thompson, C. G., Kim, R. S., Aloe, A. M., & Becker, B. J. (2017). Extracting the variance inflation factor and other multicollinearity diagnostics from typical regression results. *Basic and Applied Social Psychology*, 39(2), 81-90. <https://doi.org/10.1080/01973533.2016.1277529>
- Wahidin, D. T. S., Muhyidin, A., Iswahyuni, I., & Ilmar, A. (2020). Partai Politik dan Perilaku Pemilih Di Indonesia (Studi Pada Pemilu Legislatif 2009, 2014, dan 2019). *Journal of Government and Civil Society*, 4(1), 131-144. <http://doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2376>
- Wahyudi, H., Fernando, T., Ahmad, A., Khairani, A., Fatimah, F., Agung, I. M., & Milla, M. N. (2013). Peran kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi terhadap partisipasi politik mahasiswa. *Jurnal Psikologi*, 9(2), 94-99. <http://doi.org/10.24014/jp.v9i2.171>
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69-81. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>